

ANALISIS KEMITRAAN DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA

Citra Ramadhani^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out institutional partnerships in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Biringala Village, Barombong District, Gowa Regency. The research method used qualitative research. It purposed to understand the abilities of the research subjects, while the data collection techniques used the methods of observation, interviews and document studies. the number of informants as many as 9 people. Data analysis techniques used data collection, data reduction, data presentation and conclusions. Then, the data validation technique used source, technique and theoretical triangulation. The results showed that the Partnership Analysis in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Biringala Village, Barombong District, Gowa Regency was running well but not yet effective based on the indicators of partnership success according to the Directorate General of P2L & PM in Kuswidanti, namely, Input Indicators, Process Indicators, Output Indicators, and Indicators Outcome. Input indicators in partnership management were still not effective, planning process indicators in management there were constraints on village fund budgets were still minimal, organizational output indicators need to improve tourism village management and partnership management outcome indicators to improve Tourism Villages.

Keywords: *analysis, partnership, sustainable development goals*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan kelembagaan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah kualitatif untuk memahami kemampuan yang dilakukan oleh subjek penelitian, Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Kemudian, Teknik pengeabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, truangulasi Teknik dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berjalan dengan baik tetapi belum efektif berdasarkan indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti dilihat dari aspek Indikator input dalam pengelolaan kemitraan masih belum efektif, indikator proses perencanaan dalam pengelolaan terdapat kendala pada anggaran dana desa masih minim, indikator output pihak organisasi perlu meningkatkan pengelolaan desa wisata dan indikator outcome pengelolaan kemitraan mengupayakan peningkatan Desa Wisata.

Kata kunci: *analisis, kemitraan, sustainable development goals*

* citraramadhani@gmail.com

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. SDSs di sahkan pada tanggal 25 september 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan pembangunan Bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh banyak Negara pada Konferensi Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa mempunyai 18 Program Pembangunan berkelanjutan. Dengan kehadiran SDGs dimaksudkan guna mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam proram SDGs pada poin ke tujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan Desa di Bidang Pariwisata.

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa beserta perangkat desa dan perlemen desa. Untuk menuju tata pemerintahan desa yang lebih berkemajuan maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak ketiga, sebagaimana rujukan Undang-undang Desa tahun 2014 tentang kerjasama dengan pihak ketiga pasal 93: (1) kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarakan dalam musyawarah desa.

Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena, pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari tokoh

masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Konsekuensi dari persepsi yang mendasari analisis pada (Kamis 18-02-2022) peneliti beranggapan bahwa Kemitraan Desa Biringgala dalam Mewujudkan SDGs belum berjalan dengan baik, karena kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa Biringgala dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, peningkatan taraf hidup dan keterampilan masyarakat serta pemanfaatan untuk pengembangan desa wisata (Ungkapan dari sekretaris Desa Biringgala).

Dana desa diharapkan dapat mendorong desa untuk dapat melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik. Walau pada kenyataannya, dana desa ini bukan tanpa permasalahan. Ada pula beberapa contoh kesuksesan pemanfaatan dana desa yang bisa kita amati, diantaranya seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas program desa sejahtera mandiri, peningkatan taraf hidup dan keterampilan masyarakat, serta pemanfaatan untuk pengembangan wisata desa/desa wisata.

Dalam praktiknya, desa melakukan pengembangan kepariwisataan dalam ruang lingkup desa melalui pengelolaan 2 lembaga yang berbentuk (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (2) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Analisis Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 32) dapat diketahui bahwa: Investigasi Suatu kesempatan (akta) untuk mengetahui kondisi sebenarnya (berdasarkan fakta bahwa Musabab) di mana dapat diuraikan suatu subjek atau bagian yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang benar tanpa henti dari kepentingan umum.

Soejadi (1997:107) mengidentifikasika analisis sebagai berikut: Analisis dapat diketahui bahwa kemajuan latihan berpikir yang cerdas, masuk akal, teratur dan tujuan dengan menerapkan strategi atau prosedur sains, untuk memimpin studi, survei, pembusukan, kehalusan, menangani item atau fokus sebagai off -base Satu kebulatan seluruh bagian menjadi sub bagian yang lebih sederhana.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995, Kemitraan dapat diketahui bahwa suatu penyertaan usaha antara usaha-usaha mandiri dengan organisasi-organisasi menengah

atau organisasi-organisasi besar yang bergabung dalam pembinaan dan pembinaan oleh pusat atau organisasi besar dengan menitikberatkan pada standar kebutuhan bersama, penguatan bersama dan keuntungan bersama.

Menurut Tugimin, kerja sama dapat diketahui bahwa gerakan atau upaya yang diselesaikan oleh beberapa pertemuan dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada hanya diselesaikan.

Para ahli berpendapat bahwa kemitraan merupakan hubungan antara dua perkumpulan atau lebih yang ditujukan untuk mencari keuntungan di mana salah satu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lain namun membentuk hubungan yang mengusulkan keduanya dalam pandangan persetujuan untuk mencapai suatu tujuan. Asosiasi bisnis terkenal yang berbakat sedang dikembangkan bantuan pemerintah individu.

Kemitraan merupakan kerjasama, keseimbangan, persekutuan deviden dan organisasi yang terguling untuk kemajuan timbale balik antara pihak-pihak yang bersatu padu dalam menyelesaikan administrasi yang bersahabat (Adisasmita, 2010:150). Paguyuban dalam substansinya dikenal dengan kerjasama atau partisipasi bersama dari berbagai perkumpulan,

baik secara mandiri maupun perkumpulan. Seperti yang ditunjukkan oleh Notoatmodjo (2003), Kemitraan dapat diketahui bahwa partisipasi yang tepat antara orang-orang, pertemuan atau asosiasi hierarkis untuk menyelesaikan suatu usaha atau alasan tertentu.

Ada perbedaan pengertian perkumpulan secara keseluruhan (Dukungan Kementerian Kesehatan RI) antara lain:

Kemitraan berisi pemahaman tentang koneksi dan interelasi yang dapat diabaikan antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak dapat diketahui “Mitra” atau “Partner”. Kemitraan dapat diketahui bahwa siklus penyelidikan/lambang keselarasan yang umumnya menguntungkan dan struktur instruktif bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Kemitraan dapat diketahui bahwa suatu pekerjaan untuk mengikutsertakan bagian-bagian yang berbeda dari dua bidang, pertemuan-pertemuan lokal, yayasan-yayasan pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama berdasarkan pengaturan, standar, dan pekerjaan masing-masing. Kemitraan dapat diketahui bahwa pemahaman di mana seorang individu, pertemuan atau asosiasi untuk bekerja

sama untuk mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan dan memisahkan tugas, menanggung bersama sebagai bahaya dan manfaat, mengaudit koneksi khusus mereka dan memperbaiki pengaturan jika perlu.

Terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun suatu Kemitraan oleh setiap individu dan anggota Kemitraan (Notoatmodjo 2003), antara lain: 1) Prinsip Kesetaraan Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalani kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati, 2) Prinsip Keterbukaan Transparansi terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

Prinsip asas manfaat bersama. Individu, organisasi atau intitusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing kegiatan atau pekerjaan akan

menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Tujuan kemitraan menurut Subanar (1997:14), adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan menurut Muhammad Jafar Hafisah (2000:63) sebagai berikut: Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.

Memperluas kesempatan kerja. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono (2007:104), Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

Pola kemitraan kontra produktif. Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

Pola Kemitraan Semiproduktif. Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia

usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihakpemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan Bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

Pola Kemitraan Produktif, Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership program*.

Model-model Kemitraan menurut (Sulistiayani 2014) di bawah ini: *Pseudo Partnership*, atau Kemitraan semu.

Kemitraan Semu dapat diketahui bahwa kemitraan yang terjadi antara dua pertemuan atau lebih, namun sebenarnya tidak berkoordinasi secara baik satu sama lain. Bahkan pada satu pihak belum tentu bisa memahami secara benar makna sebuah Kemitraan. Untuk apa suatu tujuan dilakukan dan diselesaikan. Ada keunikan dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih bersama-sama merasa perlu untuk berkoordinasi, namun pihak-pihak yang bermitra tidak benar-benar memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya.

Kemitraan Semu semacam ini tampaknya terjadi dalam contoh perbaikan yang diselesaikan pada masa Orde baru, yang secara teratur dikaitkan melalui semboyan "maju dari dan oleh otoritas publik untuk individu". Orang-orang yang bermain sebagai kaki tangan pekerjaan pemerintah tidak tahu sama sekali apa pentingnya ini, meskipun mereka percaya bahwa itu penting.

Mutualism Partnership, atau Kemitraan Mutualistik. Kemitraan Mutualistik dapat diketahui bahwa persekutuan setidaknya dua

perkumpulan yang sama-sama memperhatikan bagian penting dari perkumpulan, khususnya untuk memberi manfaat dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, sehingga mereka benar-benar ingin mencapai tujuan yang lebih ideal. Berangkat dari pemahaman tentang pentingnya melakukan asosiasi, dua spesialis/perkumpulan atau lebih yang memiliki status yang sangat mirip atau berbeda, berkoordinasi. Keuntungan antara pihak-pihak dalam usaha bersama dapat diperoleh, sehingga lebih mudah bagi masing-masing dalam memahami mimpi dan misi mereka, dan sekaligus saling mendukung.

Conjugation Partnership, Kemitraan melalui pelebaran dan pengembangan. Kemitraan Konjugasi dapat diketahui bahwa Kemitraan yang mirip dengan keberadaan "Paramecium". Dua paramecium dibentuk untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan kemudian dapat melakukan pembelahan diri. Menarik diri dari hubungan ini, asosiasi, spesialis, pertemuan atau orang-orang yang memiliki kekurangan dalam menjalankan pekerjaan atau mencapai tujuan masing-masing. Pada ranah kebijakan, Kemitraan dengan model

ini. Kedua pihak tersebut dapat melakukan Konjugasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut pusat promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI dalam Kuswindanti (2008) yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:

Fungsi manajemen menurut Hamdan (1989:9) adalah kegiatan merumuskan tujuan, menentukan strategi menyeluruh tentang cara bagaimana melaksanakan tugas mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut, menetapkan hirarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Suherman (2002:2) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha para anggota, organisasi dan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Sementara G.R Terry (dalam Hardyanti 2012:16)

menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Dari penjabaran mengenai pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Berikut penjabaran dari fungsi manajemen menurut G.R Terry:

Planning (Perencanaan). George R. Terry dalam Sukarna, (2011:10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut:

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”. (Perencanaan merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan).

Terry (2008:46) mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan perencanaan (*planning*) merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi berbagai problema dimasa yang akan datang dan mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan dimasa mendatang. Planning menjadi jembatan antara posisi sekarang dengan tujuan yang akan dicapai.

Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit.

Actuating (Pelaksanaan).
Menurut George R. Terry dalam Sukarna, (2011:82) mengatakan bahwa:

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”.
(Penggerakan merupakan upaya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan).

Controlling (Pengawasan)
mempunyai peranan atau kedudukan penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

SDGs merupakan program yang disepakati sebagai agenda global PBB oleh para pemimpin dunia dari 193 negara di dunia secara resmi pada 25 september 2015 disusun atas komitmen masyarakat internasional yang menjadi sebuah tonggak baru pembangunan tiap negara, guna meneruskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), untuk kehidupan masyarakat yang lebihbaik. Kemudian dibentuk agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global.

Menurut Internasional NGO Forum Indonesia Development/INFID (2019: 9) ialah “SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru, yang

mendorong perubahan-perubahan agar bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Secara keseluruhan SDGs isinya mencakup 17 tujuan, 169 target yang berlaku sejak 2016 hingga tahun 2030”.

Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan perkembangan negaranegara di seluruh dunia, baik negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan serta ketimpangan) ataupun negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, ketersediaan air minum dan sanitasi). MDGs disempurnakan sebab hanya bertujuan mengurangi setengah dari tiap masalah pembangunan sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan. Secara proses MDGs memiliki kelemahan karena pada penyusunan hingga implementasinya cukup eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non pemerintah, akademisi, sektor bisnis dan swasta, *Civil Society Organization*, serta kelompok lainnya. Untuk itu SDGs hadir dengan harapan dapat mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih

komprehensif dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs, dan menargetkan penyelesaian tuntas terhadap pembangunan, sehingga tiap-tiap Negara memiliki peran dan tanggungjawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam pencapaian SDGs.

Konsep SDGs pertama kali lahir pada kegiatan konferensi pembangunan global yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang dihasilkan dalam pertemuan beberapa kepala Negara tersebut memperoleh tujuan yang bersifat pembangunan secara universal yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030. Di Indonesia SDGs ini kemudian dimulai sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks nasional, SDGs menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pengurus dalam semua kebijakan dan program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai tingkat nasional sampai level desa dimana SDGs Desa sudah menjadi agenda pembangunan daerah paling utama.

Menurut Iskandar (2020:100-101) konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu:

Pertama, pilar sosial. Berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*) secara berkualitas, adil, setara, peningkatan kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan; Kedua, pilar ekonomi. Berorientasi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan kemitraan. Lingkungan sosial ekonomi (*social economic development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan; Ketiga, pilar lingkungan (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Dalam menyeimbangkan ketiga dimensi pembangunan tersebut, maka untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan adalah dengan dukungan pilar hukum dan tata kelola yang menyediakan akses keadilan untuk

semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif pada semua tingkatan. Sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa dapat diketahui bahwa sebagai suatu kesatuan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai tindakan pertama mengingat keistimewaan permulaan yang luar biasa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan kota dapat diketahui bahwa keragaman dukungan, kemandirian yang unik, demokratisasi dan penguatan daerah.”

Untuk mengukur keberhasilan kemitraan maka penulis menggunakan empat indikator kemitraan menurut Ditjen P2L dan PM dalam Kuswidanti (2008:22) sebagai berikut: 1) Indikator input, 2) Indikator Proses, 3) Indikator Output, 4) Indikator Outcome.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada

di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Kemudian, Teknik pengeabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan fakta yang peneliti temui di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai indikator keberhasilan kemitraan. Pengelolaan kemitraan merupakan salah-satu potensi yang dimiliki desa biringala dalam meningkatkan perkonomian masyarakat. Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Biringala dan dijadikan sebagai Desa Wisata didaerah tersebut.

Dalam pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS dikembangkan yang bertujuan agar masyarakat melihat bahwa di Desa tersebut memerlukan pengembangan dari beberapa lokasi-lokasi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menikmati sekaligus mencintai lingkungan yang dan mencari lokasi pengembangan Desa Wisata untuk dijadikan sebagai sarana pengelolaan Kemitraan. Tentu hal ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen PM dan P2L dalam Kuswidanti yaitu: Indikator Input, Indikator Proses: menggunakan proses pengelolaan menurut G.R Terry: *planning, organizing, actuating, controlling*, Indikator Output dan indikator Outcome.

Input

Indikator Input merupakan indikator yang memuat dasar pelaksanaan kemitraan. Dalam penelitian ini indikator input menekankan kepada adanya tim atau sekretariat yang ditandai dengan kesepakatan bersama, adanya sumber dana pengelolaan, dan adanya dokumen

perencanaan yang telah disepakati institusi terkait.

Dasar pelaksanaan pengelolaan kemitraan Bersama BUMDes dan POKDARWIS di Desa Biringgala adalah keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Biringgala baik secara anggaran maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah Desa Biringgala akan terus bersinergi dalam meningkatkan pengelolaan Kemitraan tersebut.

Terkait surat keputusan yang menjadi acuan bagaimana kemitraan tersebut berjalan berdasarkan surat keputusan Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes, adapun aturan mengenai pembentukan POKDARWIS yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) yang dinaungi oleh Kementerian Dinas Pariwisata yang membahas tentang Desa Wisata.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang ada di Desa Biringgala masih cukup minim untuk meningkatkan pengelolaan Kemitraan terutama pada pembangunan fisik hal ini terjadi di tahun 2019-2011 selama masa

pandemic. Sumber daya pendapatan Desa Biringgala untuk tahun anggaran 2011 rinciannya yaitu Rp. 45.000.000 yang kemudian berupaya untuk membangun usaha untuk menunjang perekonomian di Desa Biringgala dengan jenis usaha Budidaya ikan nila, budidaya ikan lele dan café kareba. Dengan melihat substansi yang ada dalam indikator input, maka secara keseluruhan indikator input dalam Pengelolaan Kemitraan Bersama dengan BUMDes dan POKDARWIS masih belum efektif.

Proses

Dalam penelitian mengenai pengelolaan Kemitraan di Desa Biringgala Bersama dengan BUMDes dan POKDARWIS meliputi pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata, Pengoprasian Objek Desa Wisata dan pemasukan bagi masing-masing pihak pengelola dalam hal ini yakni pihak pengelolaa Desa wisata dan bagi pihak pemerintah Desa Biringgala. Dalam indikator proses ditekankan kepada sistem pengelolaan menurut G.R Terry yakni meliputi: *planning, organizing, actuating, controlling*.

Planning (Perencanaan) merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-

perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Rudy Kipling dalam Athoillah (2010:106), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut: Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan, Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang, Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, Mengembangkan rencana dan menjabarkannya.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun dari masing-masing pihak sudah menentukan sasaran dari perencanaan yang dibuat dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat kemudian dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Dari masing-masing pihak pengelola pun sudah bekerja sama dengan baik dalam hal ini pihak BUMDes dan POKDARWIS. Namun dari keseluruhan rencana pengelolaan yang sudah ada masih terdapat kendala pada penganggaran alokasi Daerah yang terbilang cukup minim dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

Organizing (Pengorganisasian) ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Ciri organisasi menurut Manullang terbagi menjadi (3) tiga yaitu: Sekelompok orang, kerjasama atau pembagian pekerjaan tujuan bersama.

Pengorganisasian dalam Pengelolaan Kemitraan Melalui BUMDes dan POKDARWIS dapat dilihat dari pembagian kerja sesuai dengan kewenangan yakni pengelolaan di lapangan. Dapat diketahui bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan Kemitraan di sini BUMDes sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Desa Wisata dan dari pihak POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata. Masing-masing pihak organisasi tersebut melakukan monitoring ataupun pembinaan terhadap masing-masing anggota organisasi apabila terdapat kendala dalam pengelolaan Desa

Wisata.

Actuating (Pelaksanaan) paling awal dari segi kepemimpinan, pihak BUMDes memiliki peran sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana dalam pengelolaan desa wisata. Masing-masing pihak organisasi berperan untuk memberikan arahan kepada setiap anggota organisasinya, membentuk rencana pengelolaan, melaksanakan rapat dan membahas pekerjaan yang akan dilakukan seperti pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir bulan. Rapat tersebut dibuar bertujuan untuk memahami masing-masing anggota organisasi kapan target pengelolaan harus selesai sehingga semuanya berjalan efektif.

Setelah melihat bagaimana arahan pemimpin maka masing-masing anggota organisasi melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Semua tugas yang diberikan tentunya tetap mengkomunikasikan dengan pimpinannya untuk kemudian masing-masing pimpinan mengkomunikasikan agar tetap menjaga tata hubungan selama berlangsungnya kemitraan supaya tujuan pengelolaan tercapai dengan optimal.

Controlling (Pengawasan) dalam pengelolaan Kemitraan di Desa Biringala dilakukan oleh kedua belah

pihak yakni BUMDes dan POKDARWIS. Masing-masing anggota kelompok melakukan pemeliharaan Desa Wisata seperti menjaga kebersihan lingkungan, memberi makan ikan setiap paginya dan melakukan penjagaan keamanan yang bekerja terbagi menjadi dua (2) shift untuk bekerja 12 jam.

Selain melakukan pengawasan masing-masing masing pihak organisasi melakukan monitoring atau pembinaan terhadap laporan kegiatan dan laporan keuangan. Serta memonitoring terkait pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Output

Dalam melihat sejauh mana keberhasilan kemitraan menurut teori indikator keberhasilan kemitraan salah satunya dilihat dari indikator output. Indikator output dalam penelitian mengenai Pengelolaan Kemitraan yang di laksanakan oleh BUMDes dan POKDARWIS tujuannya untuk mengetahui hasil dari program yang dilaksanakan selama pengelolaan Desa Wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi dimana dalam hal evaluasi tersebut terdapat hambatan-hambatan yang masih terjadi didalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

Dari masing-masing anggota organisasi sudah bekerja sama dalam peningkatan Desa Wisata. Mengikutsertakan masyarakat serta pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk UMKMnya agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Biringala.

Demi menurunkan permasalahan yang ada diharapkan dari masing-masing pihak organisasi perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pembanguna Desa Wisata serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembanguna Desa Wisata.

Outcome

Indikator outcome merupakan indikator paling akhir dari teori indikator keberhasilan kemitraan. Tujuan dari indikator outcome adalah melihat penurunan dari masalah yang terjadi sebagai bukti bahwasanya model kemitraan yang selama ini diterapkan sudah berhasil.

Melihat penurunan jumlah permasalahan yang terjadi maka dapat kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah efektif upaya-upaya peningkatan Desa Wisata terus selalu dilakukan oleh kedua pihak Organisasi agar kedepannya bisa berjalan lebih maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Kemitraan dalam Mwujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang di ukur melalui teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:91) dapat dikatakan berhasil.

Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah berjalan baik dilihat dari indikator keberhasilan kemitraan yang ada, selain itu pembangunan sejak awal pengelolaan kemitraan juga terjadi peningkatan. Melalui pengelolaan kemitraan ini juga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya. Segi yang belum optimal yaitu masalah anggaran alokasi dana desa yang masih minim sehingga pembanguna Desa Wisata belum Merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Ditjen P2M & PL. (2004). *Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah*

- Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi.* Jakarta: Depkes.
- Hafsah, Muhammad, J. (2000). *Kemitraan Usaha.* Jakarta: Sinar Harapan.
- Subanar, Harimurti. (1997). *Manajemen Usaha Kecil.* Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar, T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gava Media.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Tugimi, (2004). *Kewarganegaraan.* Surakarta: CV. Grahadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR.* Gresik: Fascho Publishing.
- R. Terry, George. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdan, Mansoer. (1989). *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamdan, Mansoer. (1989). *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.